

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DAERAH (LKJIP)

Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Sumenep

Tahun Anggaran 2023



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala limpahan rahmad dan hidayah-Nya, sehingga **LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2022**, dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumenep ini dilakukan, sebagai tindak lanjut dari perencanaan strategik dalam rangka mendukung budaya transparansi, merupakan upaya pertanggungjawaban setiap program melalui pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja setiap kegiatan, program, kebijaksanaan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Menjadi kesadaran mendalam, bahwa dalam pembuatan LKjIP ini masih banyak ditemui kekurangan. Untuk itu segala input konstruktif dan inovatif, sangat diharapkan guna kesempurnaan pelaksanaan Program Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dimasa yang akan datang.

Akhirnya penghargaan dan ungkapan terima kasih yang setinggi-tingginya, kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung penyusunan LKjIP ini, dengan harapan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan dan perencanaan kebijakan selanjutnya.

Sumenep, Januari 2023
KEPALA BADAN PENDAPATAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH KABUPATEN SUMENEP



RUDI YUYIANTO, SE., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 197003 18199803 1005

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam mencapai Misi Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumenep. Disamping itu, LKjIP dapat digunakan sebagai alat untuk menilai kinerja aparatur pemerintah dalam melaksanakan tugasnya.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumenep melaporkan capaian kinerja (performance result) sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan tahun 2022.

Berdasarkan evaluasi terhadap capaian dalam LKjIP tahun 2022 ini menunjukkan keberhasilan masing-masing tujuan dan sasaran, namun demikian masih dijumpai beberapa kekurangan yang masih perlu mendapatkan perhatian oleh Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumenep. Kekurangan dan upaya perbaikan yang akan dilakukan telah diuraikan secara lengkap pada bagian evaluasi akuntabilitas kinerja.

Pada akhirnya, Laporan ini merupakan bahan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumenep, segala kekurangan yang masih dijumpai tidak menyebabkan lemahnya motivasi tetapi justru menjadi cambuk untuk bekerja lebih baik lagi di masa yang akan datang.

Sumenep, Januari 2023
KEPALA BADAN PENDAPATAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH KABUPATEN SUMENEP



RUDI YUYIANTO, SE., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 197003 18199803 1005

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Ikhtisar Eksekutif	ii
Daftar Isi	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud Dan Tujuan	1
C. Aspek Strategis dan Permasalahan Utama	2
D. Struktur Organisasi BPPKAD	5
BAB II PERENCANAANKINERJA	7
A. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran	7
B. Sasaran Dan IKU BPPKAD	8
C. Tujuan Dan Sasaran Beserta Indikator Dan Target Tahun 2022	9
D. Perjanjian Kinerja	10
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	12
A. Capaian Kinerja Organisasi	12
B. Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Tahun Sebelumnya	12
C. Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Target Akhir Renstra	12
D. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan	13
E. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	14
F. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja	15
G. Realisasi Anggaran	18
BAB IV PENUTUP	21
Lampiran	22

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SUMENEP

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Tennis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka bersama ini kami Laporkan Kinerja Perangkat Daerah atas Perjanjian Kinerja yang telah disepakati sebelumnya.

Pelaporan Kinerja selain berpedoman kepada selain berpedoman kepada ketentuan Permenpan RB tersebut di atas, juga telah diselaraskan dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Laporan Kinerja Perangkat Daerah selain berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban dan transparansi kepada publik atas penyelenggaraan pemerintah yang menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah, juga berfungsi sebagai alat ukur untuk mengetahui kemampuan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah yang telah direncanakan dan diperjanjikan, serta sebagai bahan pertimbangan memutuskan kebijakan dalam rangka upaya perbaikan kinerja instansi pemerintah.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya LKjIP adalah sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah selama kurun waktu 1 (satu) tahun dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi.

Tujuan penyusunan LKjIP selain sebagai salah satu alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja daerah juga untuk mendapatkan masukan dari stakeholders demi perbaikan kinerja Pemerintah Kabupaten Sumenep. Keberhasilan, permasalahan, dan solusi yang tertuang dalam LKjIP menjadi sumber untuk bahan perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang.

C. ASPEK STRATEGIS DAN PERMASALAHAN UMUM

Setelah dilakukan analisa tentang gambaran pelayanan, kajian atas hasil evaluasi pelaksanaan tugas, pokok dan tata kerja serta kajian atas pencapaian sasaran strategis Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah pada bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah terdapat beberapa isu penting dalam penyelenggaraan tugas, pokok dan tata kerja. Perumusan isu-isu penting tersebut memiliki maksud untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra OPD. Adapun isu penting terkait penyelenggaraan tugas, pokok dan tata kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah sebagai berikut:

1. Kontribusi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah masih rendah atau sebaliknya sumber pendapatan daerah Kabupaten Sumenep masih banyak tergantung pada sumber pendapatan dari Pemerintah Pusat atau bersumber dari Dana Perimbangan;
2. Masih rendahnya kontribusi pendapatan asli daerah dalam mendanai belanja daerah;
3. Rendahnya kapasitas fiskal;
4. Porsi belanja pegawai terhadap belanja daerah masih tinggi;
5. Keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi dalam pengelolaan keuangan daerah;
6. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sumenep telah menyajikan informasi yang jelas dan lengkap. Hal tersebut telah mewujudkan tata kelola aset daerah yang tertib administrasi dari perencanaan sampai dengan pemanfaatan aset daerah sehingga data barang barang milik daerah yang akurat ;
7. Masih terdapat OPD yang tidak konsisten dalam melaksanakan kegiatan dengan rencana yang telah dituangkan dalam DPA OPD, sehingga penyerapan dana sebagian besar di akhir tahun anggaran.
8. Rekomendasi dan catatan strategis atas isu penting terkait penyelenggaraan tugas, pokok dan tata kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah nomor 1) peningkatan kontribusi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah atau sebaliknya berkurangnya ketergantungan pendapatan daerah Kabupaten Sumenep terhadap pendapatan dari Pemerintah Pusat atau bersumber dari Dana Perimbangan, 2) bertambahnya kontribusi pendapatan asli daerah dalam mendanai belanja daerah dan 3) bertambahnya kapasitas fiskal daerah, strategi yang diambil yaitu optimalisasi pendapatan asli daerah terutama dari pendapatan pajak dan retribusi daerah. Optimalisasi pendapatan asli daerah dilaksanakan dengan yaitu sebagai berikut :

1. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan asli daerah. Langkah-langkah yang diambil dalam melaksanakan intensifikasi sumber-sumber pendapatan asli daerah sebagai berikut:
 - a. Penyederhanaan dan modernisasi (komputerisasi) sistem perpajakan dan retribusi daerah;
 - b. Penyempurnaan landasan hukum serta law enforcement bagi pengenaan pajak dan retribusi daerah;
 - c. Sosialisasi dan pemberian penyuluhan yang memadai kepada masyarakat mengenai ketentuan pajak daerah dan retribusi daerah;
 - d. Peningkatan pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah;
 - e. Peningkatan koordinasi dan kerja sama antar unit satuan kerja terkait; dan
 - f. Peningkatan kualitas aparat pajak/retribusi daerah.
2. Sedang ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan asli daerah dilaksanakan memperkuat basis pajak dan retribusi daerah dengan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. Updating data basis pajak daerah serta optimalisasi pemanfaatan data perpajakan yang bersangkutan;
 - b. Pengkajian atas potensi dari jenis retribusi baru dan potensi pajak daerah dilaksanakan dengan kerjasama pihak ke 3 (tiga);
 - c. Optimisasi penyerapan pendapatan dari pajak daerah terutama dari PBB P2 dan BPHTB yang telah menjadi pajak daerah.
3. Meningkatkan pendapatan asli daerah bersumber dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dengan meningkatkan kontribusi pendapatan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD melalui upaya pengelolaan BUMD secara efisien dan efektif yang dapat ditempuh dengan perbaikan manajemen, peningkatan profesionalisme BUMD, serta memperkuat permodalan melalui penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah yang dianggarkan pada pengeluaran pembiayaan daerah.
4. Terwujudnya tertib administrasi dalam tata kelola aset daerah dari perencanaan sampai dengan pemanfaatan aset daerah sehingga data barang milik daerah dapat disajikan dengan akurat telah dicapainya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sumenep. Dalam rangka meningkatkan keakuratan data barang milik daerah, strategi yang diambil optimalisasi pengelolaan barang milik daerah. Kebijakan yang diambil adalah inventarisasi, klarifikasi dan penataan barang milik daerah. Cara yang ditempuh untuk mendukung strategi dan kebijakan yaitu sebagai berikut:

- a. Meningkatkan komitmen kepala OPD/Unit Kerja selaku pengguna barang/kuasa pengguna barang dalam mengelola barang daerah secara tertib administrasi sesuai aturan berlaku;
 - b. Meningkatkan pemahaman pengelola barang milik daerah SKPD/Unit Kerja tentang Peraturan Bupati Sumenep Nomor 55 Tahun 2008 tentang Sistem dan Prosedure Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Sumenep melalui kegiatan forum komunikasi pengurus barang milik daerah;
 - c. Dipergunakan SIMBADA dalam pengelolaan barang milik daerah meliputi perencanaan, pengadaan, penatausahaan, penghapusan, dan akuntansi;
 - d. Melaksanakan klarifikasi dan inventarisasi barang milik daerah yang dipergunakan OPD/Unit Kerja sebagai tindak lanjut atas temuan BPK RI terhadap Laporan Keuangan Daerah;
 - e. Meningkatkan pemahaman pengurus barang melalui bimbingan teknik dan pendampingan pengurus barang dalam pengelolaan barang daerah dari pencatatan aset daerah, barang yang berasal dari pengadaan, mutasi, hibah, penghapusan dan optimalisasi aset untuk peningkatan PAD serta optimalisasi aset bagi pengguna barang OPD.
5. OPD diharapkan konsisten dalam melaksanakan kegiatan dengan rencana yang dalam DPA OPD, sehingga penyerapan dana sebagian besar tidak terjadi di akhir tahun anggaran. Strategis yang dilaksanakan sebagai berikut:
- a. Meningkatkan disiplin anggaran bagi seluruh OPD agar kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan alokasi dalam DPA/DPPA OPD;
 - b. Meningkatkan koordinasi dengan seluruh OPD dalam rangka dilakukan evaluasi penyerapan atas anggaran belanja seluruh OPD serta di anggaran belanja pada seluruh OPD dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan aturan yang berlaku; dan
 - c. Melaksanakan pelatihan kepada seluruh pengelola keuangan OPD tentang implementasi SIMDA Keuangan Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah;

Organisasi BPPKAD

Dalam rangka memperkuat pelaksanaan otonomi daerah telah dibentuk organisasi perangkat daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep. Sebagai unsur pelaksana di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset yang merupakan gabungan dari Bagian Keuangan yang membidangi pengelolaan keuangan daerah,

Bagian Perlengkapan yang membidangi pengelolaan aset/kekayaan daerah dan Badan Pendapatan Daerah yang membidangi pengelolaan pendapatan daerah. Dalam perkembangan kebutuhan, karakteristik, kemampuan dan potensi daerah guna mendukung terselenggaranya pemerintahan dan pembangunan di daerah.

D. STRUKTUR ORGANISASI BPPKAD

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 105 Tahun 2021 Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset sebagai organisasi perangkat daerah melaksanakan urusan otonomi daerah pada bidang administrasi keuangan daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah, terdapat tiga fungsi yang melekat pada kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset yaitu sebagai Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Pembantu pengelola barang daerah (Sekretaris Daerah sebagai Pengelola Barang Daerah), dan selaku Pengguna anggaran/pengguna barang daerah. Ke-tiga fungsi tersebut di atas menunjukkan adanya pelimpahan wewenang dari Bupati Sumenep selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan barang daerah kepada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk mengelola pendapatan, keuangan dan barang daerah. Pelimpahan wewenang tersebut ditetapkan dengan keputusan Bupati Sumenep berdasarkan prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji, dan yang menerima atau mengeluarkan uang.

Peraturan Bupati Sumenep Nomor 105 Tahun 2021 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumenep, memiliki tugas yaitu melaksanakan urusan rumah tangga Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan dan Pengkoordinasian Program Kerja pelaksanaan tugas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset;
2. Pelaksanaan Program dan kebijakan teknis di Bidang Pendapatan;
3. Pelaksanaan Program dan kebijakan teknis di Bidang Penatausahaan Keuangan;
4. Pelaksanaan Program dan Kebijakan teknis di Bidang Aset;
5. Pelaksanaan Program dan Kebijakan teknis di Bidang Pembukuan dan Verifikasi;
6. Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)
7. Pelaksanaan Fungsi Bendahara Umum Daerah;

8. Penyusunan Laporan Keuangan sebagai pertanggungjawaban realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)
9. Pelaksanaan Kebijakan dan Pedoman Pengelolaan serta Penghapusan Barang milik Daerah;
10. Pelaksanaan Tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Struktur Organisasi Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sumenep berdasar Peraturan Bupati Kabupaten Sumenep Nomor 105 Tahun 2021, (terlampir)

BAB II PERENCANAAN

A. VISI, MISI TUJUAN DAN SASARAN

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode 2021-2026 adalah “**Sumenep Unggul, Mandiri, dan Sejahtera**”. Misi disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan Visi.

Adapun Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih sebagai berikut

1. Membangun kualitas sumber daya manusia (sdm) berdaya saing bidang pendidikan, kesehatan dan ketenagakerjaan
2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan ekonomi berbasis kawasan dari hulu ke hilir
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, inovatif dan responsif dalam melayani masyarakat
4. Melaksanakan pembangunan berbasis gotong royong dan berkearifan lokal
5. Memperkuat pembangunan infrastruktur berbasis lingkungan hidup yang berimbang antara daratan dan kepulauan

Terhadap Visi diatas mengandung pengertian bahwa Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sumenep dalam periode pembangunan 5 (lima) tahun ke depan akan mengarahkan dan memanfaatkan segenap sumber daya yang ada untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui penerapan tatakelola pemerintahan yang baik dan bersih yang diarahkan untuk menuju kota yang maju.

Tugas dan fungsi BPPKAD yang terkait dengan Visi Misi serta program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset. Tugas dan Fungsi BPPKAD ini berhubungan dengan Misi ke 4 (empat) Misi Pembangunan sumenep tahun 2021-2026 yaitu **Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel**. Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sumenep melaksanakan tugas, pokok dan tata kerja dijiwai dengan semangat dan komitmen melakukan pengelolaan keuangan dan aset daerah di Pemerintah Kabupaten Sumenep secara akuntabel, transparan, profesional dan bertanggungjawab dalam rangka mewujudkan *good and clean government*. Berlandaskan atas semangat dan komitmen juga berupaya mewujudkan sebagai berikut:

1. Terlaksananya pengelolaan keuangan daerah berdasarkan azas secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis,

- transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat; dan
2. Terlaksananya pengelolaan barang milik daerah berdasarkan azas fungsional, kepastian hukum, transparansi aset dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai.

A. SASARAN DAN IKU BPPKAD

Sebagai upaya untuk mewujudkan hal tersebut diatas telah terkait dengan Visi Misi serta Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah melaksanakan Urusan Pemerintah Daerah di Bidang Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset. Tugas dan Fungsi BPPKAD ini berubungan dengan Misi ke 4 (empat) Misi Pembangunan Sumenep Tahun 2021-2026 yaitu **Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel** yang telah disesuaikan dengan sasaran Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2022. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tersebut terdapat 31 sasaran Pemerintah Kabupaten Sumenep, Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset bertanggungjawab atas terwujudnya sasaran ke-pertama dan ke-tiga dari tujuan dan misi empat yaitu **“Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel”** dengan arah kebijakan inventarisasi, klarifikasi dan penataan aset daerah dan optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah.

Adapun sasaran Indikator tujuan ke-tiga Kabupaten Sumenep adalah nilai opini BPK untuk mencapai opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Keuangan Daerah BPPKAD. Sebagai alat yang dipergunakan untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis yaitu dengan ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU (key performance indikator) memiliki peran dalam merubah sesuatu yang bersifat normatif (sasaran strategis) menjadi definitif, terukur dan realitis. Berikut ini akan disajikan rumusan sasaran dan IKU Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yaitu sebagai berikut:

Rumusan sasaran dan IKU BPPKAD		
Sasaran	Indikator Kinerja	Rumus
Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban APBD	1. Nilai Opini atas audit BPK	Opini pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK
	2. Persentase Tindak Lanjut Terhadap Temuan BPK	$\frac{\text{Jumlah temuan BPK yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah temuan BPK}} \times 100\%$
Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	1. Persentase Pertumbuhan PAD	$10\% - \left(\frac{100\% - \% \text{ capaian}}{10\%} \right)$

C. TUJUAN DAN SASARAN BESERTA INDIKATOR DAN TARGET TAHUN 2022

Target Tujuan dan sasaran dan Indikator Kinerja Tahun 2022 dari masing-masing sasaran strategis pada Rencana Strategis Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumenep dengan target adalah sebagai berikut :

Rencana Strategis Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah					
Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2022	Target Akhir Tahun 2021
Meningkatkan Kualitas Perencanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban APBD	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban APBD	Nilai Opini atas audit BPK	WTP : 1 WDP : 2	1	1
		Persentase Tindakan Lanjut Terhadap Temuan BPK	%	87	85
Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Persentase Pertumbuhan PAD	%	2,5	10

D. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta kinerja utama yang akan dicapai yang ditentukan dengan mempertimbangkan tema pembangunan dan sumber daya yang tersedia.

Adapun Perjanjian Kinerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3.1
Perjanjian Kinerja Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban APBD	Nilai Opini atas audit BPK	WTP
		Persentase Tindakan Lanjut Terhadap Temuan BPK	87%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
2.	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Persentase Pertumbuhan PAD	2,5%

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan akuntabilitas kinerja memberi informasi tentang tingkat pencapaian target indikator dari masing-masing sasaran yang telah disepakati oleh Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset selaku penerima amanah dengan Bupati Sumenep sebagai pemberi amanah sebagaimana yang tertuang dalam perjanjian kinerja. Capaian kinerja diukur dengan membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja BPPKAD dengan realisasi. Pengukuran atas capaian kinerja tersebut mempergunakan skala nilai peringkat kinerja sebagai berikut:

Tabel 3 Skala Penilaian Realisasi Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	$\geq 90,1$	Sangat Baik	
2.	$75,1 \leq 90$	Tinggi	
3.	$65,1 \leq 75$	Sedang	
4.	$50,1 \leq 65$	Rendah	
5.	≤ 50	Sangat Rendah	

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Dari skala penilaian realisasi kinerja diatas, dilakukan pengukuran realisasi dan capaian kinerja sebagai berikut :

Tabel 2.3.2
Realisasi dan Capaian Kinerja Atas Target Kinerja Sasaran Renstra 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2022		
				TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban APBD	Nilai Opini atas audit BPK	WTP =1, WDP=2.	1	*	*
		Persentase Tindak Lanjut Terhadap Temuan BPK	%	87	80	91%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2022		
				TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2.	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Persentase Pertumbuhan PAD	%	2,5%	2,625	105%

* Menunggu Hasil Audit BPK

B. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DENGAN TAHUN SEBELUMNYA

Untuk memberikan informasi peningkatan realisasi kinerja 3 (tiga) tahun terakhir maka kami sajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.3.4
Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Renstra 3 (tiga) Tahun Terakhir

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI		
				2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban APBD	1. Nilai Opini atas audit BPK	WTP / WDP	WTP	WTP	*
		2. Persentase Tindak Lanjut Terhadap Temuan BPK	%	75	80	80
2	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	1. Persentase Pertumbuhan PAD	%	14.74	11,12	2,625

* Menunggu Hasil Audit BPK

Tabel 2.3.5
Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan Renstra 3 (tiga) Tahun Terakhir

NO	TUJUAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI		
				2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban APBD	1. Nilai Opini atas audit BPK	WTP / WDP	WTP	WTP	*
		2. Persentase Tindak Lanjut Terhadap Temuan BPK	%	75	80	80
2	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	1. Persentase Pertumbuhan PAD	%	14.74	11,12	2,625

* Menunggu Hasil Audit BPK

C. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DENGAN TARGET AKHIR RENSTRA

Capaian kinerja sampai dengan tahun 2022 dibandingkan dengan target kinerja yang harus dicapai pada tahun akhir Renstra, dapat diuraikan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.3.6

Capaian Kinerja Tahun 2022 Terhadap Target Kinerja Sasaran Akhir Renstra

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN s/d TAHUN 2021	TARGET 2022	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban APBD	1. Nilai Opini atas audit BPK 2. Persentase Tindak Lanjut Terhadap Temuan BPK	WTP / WDP %	WTP 80	WTP 87	* 80
2	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	1. Persentase Pertumbuhan PAD	%	11,12	2,5	2,625

* Menunggu Hasil Audit BPK

D. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN / KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN / PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN.

Analisis Keberhasilan/Kegagalan Kinerja Sasaran 1 dipengaruhi oleh :
Program/Kegiatan

Sasaran 1 : Meningkatkan Kualitas Perencanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban APBD

Keberhasilan kinerja sasaran 1 ditunjang oleh tercapainya target kinerja Program :

- a. Pengelolaan keuangan daerah.
- b. Pengelolaan barang milik daerah.

Sedangkan tercapainya kinerja program tersebut ditunjang dengan keberhasilan kinerja sebanyak 4 kegiatan

Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumenep berhasil melakukan efisiensi dan mendorong efektivitas belanja daerah yang dibuktikan dengan meraih opini BPK-RI Wajar Tanpa Perkecualian (WTP) sejak tahun 2017 hingga 2021.

Sasaran 2 : Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Keberhasilan kinerja sasaran 2 ditunjang oleh tercapainya target kinerja Program pengelolaan pendapatan daerah. Tercapainya kinerja program tersebut ditunjang kerja bersama beberapa pihak. Optimalisasi penerimaan PAD diantaranya Melakukan Pemutakhiran

data dan pengkajian kepada desa serta bekerja sama dengan Pusdatin BPN Pusat dan Bank Jatim berkenaan dengan optimalisasi dan transparansi pengelolaan pajak BPHTB dengan menggunakan online system (E-BPHTB), menerapkan / menempatkan Billy sistem terhadap Hotel dan Restoran dalam rangka optimalisasi pajak Hotel dan Restoran. Capaian indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah dari Persentase Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah telah mencapai 105%.

E. ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Untuk mengukur tingkat efisiensi sumber daya pada tahun 2022, dapat dilakukan dengan melakukan Analisis Efisiensi atas realisasi kinerja Sasaran Renstra sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.3.8
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Anggaran Atas
Realisasi Kinerja Sasaran Renstra

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KINERJA			ANGGARAN			TINGKAT EFISIENSI
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN	ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)	PENYERAPAN ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban APBD	1. Nilai Opini atas audit BPK	WTP / WDP	WTP	*	*	559.433.430.760	547.982.928.989	97,95	2,05
		2. Persentase Tindak Lanjut Terhadap Temuan BPK	%	87	80	91	-	-	-	-
2	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	1. Persentase Pertumbuhan PAD	%	2.5	2,625	105	1.790.004.708,00	1.458.545.335,00	81,48	18,52

F. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN / KEGAGALAN KINERJA

Tingkat capaian kinerja dipengaruhi oleh beberapa faktor baik berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap tercapainya target kinerja.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan kinerja tujuan, sasaran, program dan kegiatan dilakukan untuk mengetahui sejauh mana efektivitas dan efisiensi baik sasaran, program maupun kegiatan sebagai outcome tujuan

pembangunan daerah. Adapun realisasi tujuan, sasaran, program dan kegiatan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.3.9 Realisasi Tujuan, Sasaran, Program Dan Kegiatan

No.	TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALIASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	100 %	85 %	85,00 %
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	13 Dokumen	13 Dokumen	100,00 %
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	jumlah dokumen RKA yang disusun sesuai ketentuan	1 dokumen	1 dokumen	100,00 %
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang disusun sesuai ketentuan	4 laporan	4 laporan	100,00 %
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	6 Laporan	6 Laporan	100,00 %
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan terpenuhinya pembayaran gaji dan tunjangan ASN	12 bulan	12 bulan	100,00 %
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	jumlah dokumen yang terverifikasi	1 dokumen	1 dokumen	100,00 %
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Layanan Kepegawaian yang disediakan	4 Jenis	8 Jenis	200,00 %
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	jumlah pengadaan pakaian dinas ASN	200 stel	200 stel	100,00 %
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti pelatihan sesuai tugas dan fungsi	5 orang	5 orang	100,00 %
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	jumlah peserta bimbingan teknis	20 orang	20 orang	100,00 %
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kebutuhan Perangkat Daerah yang dipenuhi	15 jenis	15 jenis	100,00 %
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis/item komponen instalasi listrik yang disediakan	10 jenis	10 jenis	100,00 %

	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	20 unit	20 unit	100,00 %
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah jenis ATK yang disediakan	10 jenis	10 jenis	100,00 %
		jumlah makan dan minum yang disediakan	2 paket	2 paket	100,00 %
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan	1 paket	1 paket	100,00 %
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah bahan bacaan dan Perketentuan Perundang-undangan yang disediakan	2 jenis	2 jenis	100,00 %
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	50 kali	50 kali	100,00 %
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	jumlah arsip yang dikelola	100 m'	100 m'	100,00 %
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Layanan Jasa yang disediakan	4 Jenis	12 Jenis	300,00 %
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening Tagihan Listrik, Air, Telepon dan Internet	4 rekening	12 rekening	300,00 %
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara	15 Unit	15 Unit	100,00 %
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dikelola	40 unit	40 unit	100,00 %
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	20 unit	20 unit	100,00 %
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	2 unit	2 unit	100,00 %
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Tertib Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah	91 %	85 %	93,41 %
	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Rencana anggaran yg disusun	100 %	100 %	100,00 %
	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Laporan Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS yang di susun	1 Laporan	1 Laporan	100,00 %
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Laporan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang di susun	1 Laporan	1 Laporan	100,00 %
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA dan DPPA yang selaras dengan APBD	51 Dokumen	51 Dokumen	100,00 %

	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPPA yang selaras dengan Perubahan APBD	51 Dokumen	51 Dokumen	100,00 %
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Perbup Penjabaran APBD yang disusun	1 Perbup	1 Perbup	100,00 %
		Jumlah Perda APBD yang disusun	1 Perda	1 Perda	100,00 %
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Perbup Perubahan Penjabaran APBD yang disusun	1 Perbup	1 Perbup	100,00 %
		Jumlah Perda Perubahan APBD yang disusun	1 Perda	1 Perda	100,00 %
	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Perbup tentang Penganggaran	2 Perbup	2 Perbup	100,00 %
	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Rancangan Perencanaan Anggaran dan Perubahan Anggaran Pendapatan sesuai dengan Regulasi yang berlaku	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00 %
	Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang mengikuti Bimtek	51 OPD	51 OPD	100,00 %
	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Dokumen Perbendaharaan Yang dikelola	95 %	95 %	100,00 %
	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah laporan pengelolaan kas daerah	6 Laporan	6 Laporan	100,00 %
	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	183 Dokumen	183 Dokumen	100,00 %
	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah laporan realisasi pengeluaran dana perimbangan dan dana transfer lainnya	12 Laporan	12 Laporan	100,00 %
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pemungutan dan Penyetoran Pihak Ketiga (PFK)	12 Laporan	12 Laporan	100,00 %
	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Persentase Jumlah SP2D yang diterbitkan berdasarkan pengajuan	95 Persentase	95 Persentase	100,00 %
	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang mengikuti pembinaan	51 OPD	51 OPD	100,00 %
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase penyelesaian laporan keuangan daerah	100 %	100 %	100,00 %

	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Dokumen Rekonsiliasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas	8 Dokumen	16 Dokumen	200,00 %
	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah dokumen laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	3 Dokumen	3 Dokumen	100,00 %
	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen Hasil Konsolidasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Dokumen	2 Dokumen	200,00 %
	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	jumlah dokumen Rancangan Perbup tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	1 Dokumen	2 Dokumen	200,00 %
	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang mengikuti pembinaan pelaporan dan pertanggungjawaban pemerintah kabupaten/kota	51 OPD	102 OPD	200,00 %
	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Dokumen Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Yang dikelola	95 %	75 %	78,95 %
	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	persentase Penyaluran Bantuan Keuangan desa sesuai dengan usulan	95 Persentase	95 Persentase	100,00 %
	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	persentase Dana Darurat sesuai dengan usulan	95 Persentase	85 Persentase	89,47 %
	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Persentase Dana Bagi Hasil sesuai dengan usulan	95 Persentase	35 Persentase	36,84 %
	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah	91 %	91 %	100,00 %
	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Ketepatan Waktu dalam Penyelesaian Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah	91 %	91 %	100,00 %
	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00 %
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Data OPD penyusun perencanaan kebutuhan barang milik Daerah	51 Dokumen	51 Dokumen	100,00 %
	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen daftar aktiva tetap se kabupaten sumenep	1 Dokumen	3 Dokumen	300,00 %

	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan data pengamanan aset/barang milik daerah sekabupaten sumenep	1 Laporan	1 Laporan	100,00 %
	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	jumlah Dokumen data perubahan status Barang Milik	1 Dokumen	20 Dokumen	2.000,00 %
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Peningkatan Penerimaan Daerah	2,5 %	2,625 %	105,00 %
	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Persentase Pertumbuhan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	2,5 %	2,625 %	105,00 %
	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Penyusunan Dokumen Potensi Penerimaan Pajak Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00 %
	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Jumlah Penyusunan dan Penyesuaian Regulasi Pajak Daerah	1 Regulasi	1 Regulasi	100,00 %
	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Kegiatan sosialisasi, penyuluhan dan penyebarluasan informasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	20 Kali	18 Kali	90,00 %
	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Data Objek Pajak daerah Lainnya/PDL yang terupdate	7 Data Objek Pajak	8 Data Objek Pajak	114,29 %
	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	jumlah Data Objek Pajak PBB-P2 dan BPHTB yang terupdate	2 Data Objek Pajak	2 Data Objek Pajak	100,00 %
	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Penilaian dan Penetapan Pajak Daerah	2 Pajak Daerah	6 Pajak Daerah	300,00 %
	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jenis Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	10 Jenis	10 Jenis	100,00 %
	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Data Pelaporan Jenis Wajib Pajak self Assignment yang terverifikas	7 Laporan	7 Laporan	100,00 %
	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Jenis Pajak Daerah yang dilakukan penagihan	10 Jenis	10 Jenis	100,00 %
	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	9 Kali	8 Kali	88,89 %
	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah kegiatan pemeriksaan dan pengawasan Wajib Pajak Daerah	24 Kegiatan	24 Kegiatan	100,00 %

Realisasi Kinerja Tahun 2022

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan kinerja yaitu :

- I. Tujuan 1 : Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban APBD. Sasaran Terwujudnya Akuntabilitas Keuangan Kinerja Pemerintah Daerah sebesar 100% (masih proses pemeriksaan BPK-RI) dengan indikator Opini hasil Pemeriksaan BPK-RI, Persentase Tindak lanjut terhadap Temuan BPK-RI, belum terealisasi disebabkan masih dalam proses Pemeriksaan BPK-RI atas target Wajar Tanpa Perkecualian (WTP) Keberhasilan sasaran tersebut ditunjang dengan keberhasilan program diantaranya :
 1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar 93,41% dengan indikator Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah yang tertib terealisasi 85% atas target 91% Keberhasilan Program tersebut ditunjang dengan keberhasilan kegiatan diantaranya :

Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah sebesar 100% dengan indikator Jumlah data penyusunan laporan keuangan daerah terealisasi 100%. Adapun aksi kegiatan dimaksud yang kami laksanakan adalah Menyiapkan data dan bahan penyusunan kebijakan akuntansi keuangan daerah..
 - I. Tujuan 2 : Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah
Sasaran Meningkatkan Kemandirian Keuangan Pemerintah sebesar 100% dengan indicator Persentase Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terealisasi 2,65 % atas target 2,5% Keberhasilan Program tersebut ditunjang dengan keberhasilan kegiatan diantaranya :
 - Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah yang tercapai 105% sesuai target. Adapun target-target seluruh sub kegiatan juga tercapai 100%
- G. Realisasi Anggaran
Realisasi anggaran program/kegiatan merupakan realisasi penyerapan anggaran program/kegiatan tahun anggaran 2021. Adapun realisasi program/kegiatan secara rinci sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.6.11

Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Tahun Anggaran 2022

No.	TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	PAGU	REALIASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	61.011.811.248	47.239.320.122	77,43 %
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	62.560.000	61.400.250	98,15 %
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	jumlah dokumen RKA yang disusun sesuai ketentuan	29.695.000	28.787.250	96,94 %
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang disusun sesuai ketentuan	32.865.000	32.613.000	99,23 %
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	55.050.266.609	42.016.418.840	76,32 %
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan terpenuhinya pembayaran gaji dan tunjangan ASN	55.016.050.109	41.982.412.840	76,31 %
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	jumlah dokumen yang terverifikasi	34.216.500	34.006.000	99,38 %
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Layanan Kepegawaian yang disediakan	304.438.000	227.325.431	74,67 %
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	jumlah pengadaan pakaian dinas ASN	183.974.000	154.475.000	83,97 %
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti pelatihan sesuai tugas dan fungsi	21.000.000	5.050.000	24,05 %
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	jumlah peserta bimbingan teknis	99.464.000	67.800.431	68,17 %
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kebutuhan Perangkat Daerah yang dipenuhi	3.689.573.074	3.311.770.948	89,76 %
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis/item komponen instalasi listrik yang disediakan	29.988.130	29.947.500	99,86 %
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	26.182.695	19.652.900	75,06 %

	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah jenis ATK yang disediakan jumlah makan dan minum yang disediakan	2.792.270.949	2.498.233.104	89,47 %
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan	24.904.000	22.290.000	89,50 %
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	145.400.000	135.654.200	93,30 %
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	123.746.000	117.156.886	94,68 %
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	jumlah arsip yang dikelola	547.081.300	488.836.358	89,35 %
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Layanan Jasa yang disediakan	474.063.948	321.058.530	67,72 %
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening Tagihan Listrik, Air, Telepon dan Internet	474.063.948	321.058.530	67,72 %
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara	1.032.340.887	931.904.215	90,27 %
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dikelola	298.836.900	295.171.385	98,77 %
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	448.586.672	362.641.500	80,84 %
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	284.917.315	274.091.330	96,20 %
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Tertib Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah	559.433.430.760	547.982.928.969	97,95 %
	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Rencana anggaran yg disusun	887.877.210	697.294.191	78,53 %
	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Laporan Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS yang di susun	137.679.780	131.252.410	95,33 %
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Laporan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang di susun	159.728.340	124.191.060	77,75 %
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA dan DPPA yang selaras dengan APBD	6.283.420	5.942.420	94,57 %
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPPA yang selaras dengan Perubahan APBD	9.443.720	7.116.248	75,35 %

	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Perbup Penjabaran APBD yang disusun Jumlah Perda APBD yang disusun	150.177.947	87.409.292	58,20 %
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Perbup Perubahan Penjabaran APBD yang disusun Jumlah Perda Perubahan APBD yang disusun	146.562.833	112.603.189	76,83 %
	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Perbup tentang Penganggaran	253.346.200	206.703.434	81,59 %
	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Rancangan Perencanaan Anggaran dan Perubahan Anggaran Pendapatan sesuai dengan Regulasi yang berlaku	14.134.970	12.639.388	89,42 %
	Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang mengikuti Bimtek	10.520.000	9.436.750	89,70 %
	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Dokumen Perbendaharaan Yang dikelola	284.533.520	256.730.413	90,23 %
	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah laporan pengelolaan kas daerah	40.662.000	39.992.725	98,35 %
	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	9.539.500	9.505.500	99,64 %
	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah laporan realisasi pengeluaran dana perimbangan dan dana transfer lainnya	13.850.000	13.819.000	99,78 %
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pemungutan dan Penyetoran Pihak Ketiga (PFK)	39.750.000	32.739.214	82,36 %
	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Persentase Jumlah SP2D yang diterbitkan berdasarkan pengajuan	166.502.020	154.033.974	92,51 %
	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang mengikuti pembinaan	14.230.000	6.640.000	46,66 %
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase penyelesaian laporan keuangan daerah	311.551.600	290.583.184	93,27 %

	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Dokumen Rekonsiliasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas	68.770.850	68.770.400	100,00 %
	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah dokumen laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	34.532.500	29.876.750	86,52 %
	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen Hasil Konsolidasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	44.210.000	38.303.212	86,64 %
	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	jumlah dokumen Rancangan Perbup tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	128.148.000	118.381.652	92,38 %
	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang mengikuti pembinaan pelaporan dan pertanggungjawaban pemerintah kabupaten/kota	35.890.250	35.251.170	98,22 %
	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Dokumen Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Yang dikelola	557.949.468.430	546.738.321.181	97,99 %
	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	persentase Penyaluran Bantuan Keuangan desa sesuai dengan usulan	532.101.468.430	530.747.251.623	99,75 %
	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	persentase Dana Darurat sesuai dengan usulan	22.250.000.000	12.437.756.558	55,90 %
	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Persentase Dana Bagi Hasil sesuai dengan usulan	3.598.000.000	3.553.313.000	98,76 %
	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah	2.999.083.536	1.080.444.067	36,03 %
	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Ketepatan Waktu dalam Penyelesaian Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah	2.999.083.536	1.080.444.067	36,03 %
	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	209.820.000	204.299.784	97,37 %
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Data OPD penyusun perencanaan kebutuhan barang milik Daerah	59.176.150	27.621.000	46,68 %
	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen daftar aktiva tetap se kabupaten sumenep	94.942.275	93.860.545	98,86 %

	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan data pengamanan aset/barang milik daerah sekabupaten sumenep	2.324.754.111	649.199.138	27,93 %
	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	jumlah Dokumen data perubahan status Barang Milik	310.391.000	105.463.600	33,98 %
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Peningkatan Penerimaan Daerah	1.586.926.260	1.517.355.408	95,62 %
	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Persentase Pertumbuhan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	1.586.926.260	1.517.355.408	95,62 %
	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Penyusunan Dokumen Potensi Penerimaan Pajak Daerah	88.050.000	87.684.859	99,59 %
	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Jumlah Penyusunan dan Penyesuaian Regulasi Pajak Daerah	5.616.000	3.141.750	55,94 %
	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Kegiatan sosialisasi, penyuluhan dan penyebarluasan informasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	192.941.000	172.281.750	89,29 %
	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Data Objek Pajak daerah Lainnya/PDL yang terupdate	21.800.000	16.539.000	75,87 %
	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	jumlah Data Objek Pajak PBB-P2 dan BPHTB yang terupdate	768.817.200	762.436.500	99,17 %
	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Penilaian dan Penetapan Pajak Daerah	290.277.810	281.479.000	96,97 %
	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jenis Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	30.206.250	29.302.507	97,01 %
	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Data Pelaporan Jenis Wajib Pajak self Assigment yang terverifikas	73.190.000	69.873.269	95,47 %
	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Jenis Pajak Daerah yang dilakukan penagihan	57.900.000	51.038.869	88,15 %
	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	30.230.000	30.211.750	99,94 %
	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah kegiatan pemeriksaan dan pengawasan Wajib Pajak Daerah	22.450.000	13.366.154	59,54 %

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja BPPKAD tahun 2022 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kepala BPPKAD kepada Bupati Sumenep yang telah memberi amanah dan tugas sebagaimana yang tertuang dalam dokumen perjanjian kinerja. Pencapaian atas ke dua indikator kinerja dari sasaran strategis yang merupakan indikator kinerja utama (IKU) BPPKAD sebagaimana yang diatur dalam pada Peraturan Bupati Sumenep tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Sumenep Tahun 2016-2021, dapat disimpulkan sudah sesuai dengan target bahkan melebihi target katagori Sangat Baik. Rata-rata capaian indikator kinerja dari masing-masing sasaran sebagai berikut:

- Sasaran Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban APBD rata-rata capaian indikator kinerja sebesar diatas 98% katagori **Sangat Baik**. Capaian tersebut memberi gambaran pengelolaan keuangan dan aset daerah di Pemerintah Kabupaten Sumenep semakin tertib, transparan dan akuntabel dalam rangka mewujudkan tujuan utama yaitu mewujudkan good governance dan clean goverment.
- Sasaran Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah rata-rata capaian indikator kinerja mendapatkan prosentase diatas 105% maka capaian tersebut masuk katagori **Sangat Baik**. Capaian tersebut menginformasikan tentang peranan pendapatan asli daerah semakin meningkat dalam memberi kontribusi terhadap pendapatan daerah dan mendanai belanja daerah.

Hasil pengukuran kinerja ke dua indikator kinerja utama BPPKAD tahun 2022 disimpulkan Dua indikator kinerja dengan katagori **Sangat Baik**.

-

KEPALA BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SUMENEP



RUDI YUYIANTO, SE, M.Si.

Pembina Tingkat I
NIP. 197003 18199803 1005

Daftar Lampiran

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH



